

# ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MEMBANTU PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

Imelda Emilia Inkiriwang  
NPP. 30.1280

*Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email : imeldainkiriwang@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Researchers focused on how the implementation of the Family Hope Program (PKH) for People with Social Welfare Problems in Manado City was running in accordance with Permensos No. 1 of 2018. **Purpose:** The purpose of this research was conducted to find out how the program was implemented Family Hope Program (PKH) in Manado City, the obstacles found in the implementation of PKH and the efforts made by the Social Service in overcoming these obstacles. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used in this research are observation, interview and documentation techniques. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of the Family Hope Program in Manado City has been going well and has helped the economy a lot for underprivileged families, there are obstacles in the form of a lack of PKH assistants, data that is not appropriate, and a wrong mindset about PKH assistance. **Conclusion:** The implementation of the Family Hope Program to help people with social welfare problems in Manado City has been going well in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 where many underprivileged people feel that this assistance is very useful for them and the amount of assistance provided is also sufficient in help lighten the burden of daily expenses.

**Keywords:** Evaluation, Family Hope Program (PKH), Manado City Social Service

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peneliti berfokus pada bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Manado apakah sudah berjalan sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Manado, hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan PKH dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Manado sudah berjalan dengan baik dan banyak

membantu perekonomian bagi keluarga kurang mampu, terdapat hambatan berupa kurangnya tenaga pendamping PKH, data yang kurang sesuai, serta pola pikir yang salah terhadap bantuan PKH ini. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Manado sudah berjalan secara baik sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dimana banyak masyarakat kurang mampu yang merasa bantuan ini sangat bermanfaat bagi mereka serta nominal bantuan yang diberikan juga sudah cukup dalam membantu meringankan beban pengeluaran sehari-hari.

**Kata kunci:** Evaluasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial Kota Manado

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado, yang dikelilingi dengan daerah pegunungan dan pesisir pantai. Banyaknya penduduk dan bangunan gedung tinggi serta kawasan perumahan di pusat Kota Manado menjadikan Kota Manado merupakan wilayah terpadat penduduk di Sulawesi Utara. Tak dapat dihindari bahwa ditengah hiruk pikuknya ibukota provinsi masih banyak terdapatnya masyarakat miskin dengan taraf kesejahteraan hidup yang rendah. Terlebih dipinggiran perkotaan merupakan tempat biasanya yang paling banyak masyarakat miskin bermukim. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk dari kabupaten atau desa lain yang mengungsi ke perkotaan yang sebagian besar alasannya untuk mencoba peruntungan nasib di ibukota provinsi. Akibatnya semakin banyak dan padat penduduk di ibukota tetapi tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang cukup sehingga mau tidak mau proses seleksi alam terjadi yang menyebabkan banyak yang harus kehilangan pekerjaannya juga.

Sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Manado juga meningkat dimana tercatat pada tahun 2019 terdapat 38.722 jiwa. Pembangunan ekonomi yang tidak merata membuat pembangunan hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang kemudian menimbulkan kesenjangan pada kehidupan sosial dan kemiskinan. Permasalahan lain juga yang menyebabkan timbulnya PMKS yaitu karena tingkat urbanisasi yang ada di kota Manado cukup tinggi seiring dengan lajunya tingkat urbanisasi yang terjadi di Kota Manado, ternyata tidak mampu menampung seluruh pelaku-pelaku urbanisasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku urbanisasi membuat banyak diantaranya menjadi pengangguran.

Faktor pendidikan yang tidak merata juga mempengaruhi tingkat masalah sosial yang ada di Kota Manado. Alasan pendidikan penting dalam mengatasi ketimpangan sosial adalah pendidikan mampu mengubah wawasan, cara pandang, cara berpikir, dan persepektif masyarakat. Dalam upaya mengatasi taraf kesejahteraan hidup masyarakat yang rendah, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa bantuan sosial dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Namun, tentunya dalam menyalurkan bantuan program keluarga harapan ini tak luput dari beberapa kendala atau hambatan. Misalnya dalam mendaftarkan diri secara online sebagai keluarga penerima manfaat masih ditemukan banyak kendala seperti banyaknya masyarakat yang ketinggalan zaman dan tidak memiliki teknologi yang memadai dalam melakukan pendaftaran online tersebut. Ada beberapa permasalahan yang timbul dari penyaluran bantuan sosial ini seperti kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat, sampai dengan dampak dari pemberian bantuan yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya, sehingga dalam beberapa kasus bantuan sosial program keluarga harapan ini dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu

Upaya menganalisis pelaksanaan program keluarga harapan ini dilaksanakan guna perbaikan kebijakan yang akan datang, apakah permasalahan menyangkut substansi kebijakan atau faktor lingkungan kebijakan proses pengkajian ini akan menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Pengkajian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak yang terkait yang kemudian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk program selanjutnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terlebih bagi masyarakat miskin.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Tingginya Masalah Kesejahteraan Sosial di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan. Masalah kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2019 terdapat 23.890 jiwa menjadi 26.780 jiwa pada tahun 2021. Selain itu, dampak negatif dari pembangunan ekonomi yang tidak merata juga membuat pembangunan hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang kemudian menimbulkan kesenjangan pada kehidupan sosial dan kemiskinan. Permasalahan lain juga yang menyebabkan timbulnya PMKS yaitu karena tingkat urbanisasi yang ada di kota Manado cukup tinggi seiring dengan lajunya tingkat urbanisasi yang terjadi di Kota Manado, ternyata tidak mampu menampung seluruh pelaku-pelaku urbanisasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku urbanisasi membuat banyak diantaranya menjadi pengangguran.

Faktor pendidikan yang tidak merata juga mempengaruhi tingkat masalah sosial yang ada di Kota Manado. Kurangnya pendidikan yang didapat oleh masyarakat membuat banyak dari mereka memilih pemikiran sempit untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki pekerjaan dan menjadi pengangguran ataupun gelandangan. Alasan pendidikan penting dalam mengatasi ketimpangan sosial adalah pendidikan mampu mengubah wawasan, cara pandang, cara berpikir, dan persepektif masyarakat.

Dalam menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan ini tak luput dari beberapa kendala atau hambatan. Misalnya dalam mendaftarkan diri secara online sebagai Keluarga Penerima Manfaat masih ditemukan banyak kendala seperti banyaknya masyarakat yang ketinggalan zaman dan tidak memiliki teknologi yang memadai dalam melakukan pendaftaran online tersebut. Menurut data dari BPS ditemukan bahwa dari 549 KPM yang tercatat di DTKS, masih terdapat 12% KPM yang masih belum tercatat di DTKS dikarenakan mereka masih belum paham bagaimana caranya mendaftarkan diri menggunakan teknologi. Oleh karena itu, untuk membantu masyarakat maka ketua RT atau kepala lingkungan ditugaskan untuk mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan dari pemerintah ini sehingga bagi masyarakat yang masih belum mengerti teknologi juga boleh mendaftar sebagai salah satu KPM. Selain itu, data yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga memiliki banyak kekeliruan sehingga adanya dana yang tidak tepat sasaran menyebabkan dana atau anggaran pemerintah menjadi terbuang percuma, bahkan terkadang disalahgunakan oleh beberapa pihak.

Penyaluran bantuan sosial ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan yang dibagi dalam 3 (tiga) periode, dengan besaran Rp. 600.000,00. Ada beberapa permasalahan yang timbul dari penyaluran bantuan sosial ini seperti kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat, sampai dengan

dampak dari pemberian bantuan yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dalam beberapa kasus bantuan sosial program keluarga harapan ini dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan PKH maupun konteks upaya untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penelitian oleh Muhammad Taufiq Razali yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun (Taufiq Razali, 2018) menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Asam sudah terlaksana dengan baik, dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hanya saja diperlukan perbaikan dalam pendataan calon program ini sehingga mampu untuk mencakup seluruh keluarga miskin di Desa Sungai Asam. Penelitian oleh Wenny Desty Febrian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota (Wenny Desty, 2019) menemukan bahwa indikator efektivitas pelaksanaan PKH di Nagari Tanjung Bungo sudah berjalan dengan baik, dari segi indikator pemerataan sudah berjalan sesuai prosedur tetapi belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang seharusnya menjadi KPM belum mendapatkan haknya tersebut, dan dari segi Responsivitas pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan sangat baik. Penelitian oleh Mauizatun Hasanah yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (Mauizatun Hasanah, 2020) menemukan bahwa evaluasi konteks dan proses sudah dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan, namun masih terdapat kekurangan dalam input dimana sumber daya manusia yang dimiliki PKH belum mampu memastikan KPM untuk mendapatkan haknya sehingga masih terdapat KPM yang belum mendapatkan dana bantuan PKH ini dan juga sarana dan prasarana yang diberikan dirasa masih kurang seperti laptop, meja dan kursi, kendaraan operasional serta gedung pertemuan.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena dapat dilihat dari lokasi penelitian sudah jelas berbeda yaitu di Dinas Sosial Kota Manado, dan juga penelitian terdahulu lebih berfokus kepada evaluasi pelaksanaan PKH sedangkan penulis lebih fokus pada analisis bagaimana pelaksanaan PKH. Selain itu, metode yang digunakan juga berbeda dimana penulis sebelumnya yaitu Mauizatun Hasanah menggunakan model evaluasi Contexts Input Process Product (CIPP) sedangkan penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan teori Evaluasi menurut William Dunn (2000) dimana mengevaluasi pelaksanaan PKH di Kota Manado dengan menggunakan enam indikator penilaian, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis juga menghubungkan dengan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum yang disesuaikan dengan tema fakultas penulis.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan dengan jelas tentang bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Manado. Selain itu untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Manado dan juga untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Manado dalam mengatasi hambatan tersebut.

## **II. METODE**

Penulis menganalisis menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn tahun 2000 yang menjelaskan bahwa penilaian evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan terbagi menjadi enam indikator, yaitu : (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan. Penulis menilai bahwasanya konsep yang dijelaskan dalam teori tersebut lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan atas rumusan masalah sesuai dengan konteks permasalahannya.

Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Manado, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Subbidang Jaminan Sosial Keluarga, Koordinator Pendamping PKH Kota Manado, dan Keluarga Penerima Manfaat (dalam hal ini penerima bantuan sebagai objek penelitian sebanyak 6 orang).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn tahun 2000 yang menjelaskan bahwa penilaian evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan terbagi menjadi enam indikator, yaitu : (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1 Efektivitas**

Dimensi efektivitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah PKH ini sudah tercapai sasaran dan tujuannya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Dalam hal ini bisa dapat digambarkan bahwa apakah pelayanan yang diberikan dari program ini memiliki manfaat bagi penerimanya dan apakah penerima bantuan PKH ini merasa puas dengan bantuan dana dari PKH ini. Indikator ini sangat penting, sebab salah satu tujuan dari mengevaluasi program ini adalah untuk menilai seberapa bermanfaatnya bantuan ini bagi penerimanya. Berdasarkan hasil wawancara serta hasil observasi peneliti dengan masyarakat, banyak masyarakat yang merasa bahwa bantuan ini sangat bermanfaat dan merasa puas dengan bantuan ini.

Tingkat efektivitas program menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan program yang direncanakan dengan membandingkan terhadap target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat juga dievaluasi dari indikator input, proses, output, dan outcome. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan program keluarga harapan ini. Sumber daya yang dimaksud disini ialah bantuan dana yang diberikan kepada KPM, dimana sumber dana dari bantuan ini dari pemerintah pusat sendiri dengan menggunakan uang negara yang dianggarkan di dalam APBN sehingga dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak

mudah disalahgunakan. Dari segi proses, PKH ini sudah berjalan dengan baik, seperti pelayanan yang baik dan ramah, pembagian bantuan tepat waktu, serta nominal dana yang diberikan mampu untuk meringankan beban rumah tangga. Dalam proses pendistribusian bantuan juga berjalan dengan efektif dimana pendistribusian bantuan berjalan dengan lancar, diberikan dengan tepat kepada KPM yang terdaftar dan juga tidak menemui hambatan yang berarti.

Output merupakan hasil yang dicapai dari Program Keluarga Harapan ini. Hasil dari pelaksanaan KPM ini setelah peneliti melakukan observasi langsung dilapangan bahwa bantuan dari PKH ini dapat mengurangi beban rumah tangga. Dana dari bantuan PKH ini dapat digunakan untuk berbagai hal seperti membeli beras, minyak goreng, lauk dan sayuran, serta membayar tagihan listrik dan air. Outcome atau dampak dari program ini dapat dirasakan bagi KPM, dimana menurut KPM banyak yang merasa bahwa bantuan ini sangat membantu dalam meringankan beban tanggungan dalam rumah tangga.

### **3.2 Efisiensi**

Dimensi efisiensi ini merupakan indikator untuk menilai seberapa besar usaha yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan ini. Efisiensi ini lebih merujuk kepada Dinas Sosial sebagai instansi yang diamanatkan untuk menjalankan program ini. Kriteria dimensi efisiensi ini terikat dengan tiga indikator yaitu indikator tenaga, indikator waktu, serta indikator biaya bantuan.

Untuk dapat mendata dengan baik jumlah penerima bantuan PKH ini, maka diperlukan beberapa petugas tambahan yang dapat mengawasi secara langsung di setiap kecamatan yang mana hal ini sangat penting untuk menjalankan program ini. Petugas tambahan yang dimaksud ini adalah Pendamping PKH dimana pendamping PKH ini disebar per kecamatan yang mana perkecamatan itu terdiri dari beberapa petugas yang jumlah petugasnya disesuaikan dengan banyaknya penerima PKH di daerah tersebut dengan jumlah maksimal 350 KPM per pendamping PKH. Jumlah Pendamping PKH di Kota Manado sebanyak 38 orang yang terdiri dari 35 pendamping kecamatan, 2 orang admin, serta 1 orang Koordinator PKH yang mana tugas dari Koordinator ini untuk mengkoordinasikan pendamping PKH antara satu dengan yang lainnya serta bertanggung jawab akan program-program PKH. Berdasarkan wawancara dengan KPM serta observasi langsung dilapangan sebagian besar menyatakan bahwa sangat puas dengan kinerja pendamping PKH yang dinilai sangat membantu dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan juga menilai bahwa kinerja pendamping PKH sangat baik yang mana selalu memberikan motivasi, saling bertukar cerita serta saling mendukung dan menguatkan yang mana hal ini sangat membantu kondisi kesehatan mental para penerima bantuan PKH ini.

Indikator yang kedua yaitu indikator waktu yang mana berkaitan dengan lamanya proses penyaluran bantuan PKH ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan, banyak yang menyatakan bahwa bantuan PKH ini diberikan tepat sesuai dengan waktu yang seharusnya yang mana PKH ini terbagi menjadi 4 tahap per tahunnya.

Indikator yang ketiga yaitu biaya bantuan yang diberikan, dimana menurut sebagian penerima bantuan bahwa nominal yang diberikan sudah tepat dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka yang diberikan sesuai dengan jumlah tanggungan dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi ada sebagian KPM yang merasa bahwa nominal bantuan yang diberikan tidak cukup dan tidak sesuai dengan jumlah tanggungan yang seharusnya ada dalam keluarga penerima manfaat tersebut. Akan tetapi, besarnya nominal bantuan yang diberikan kepada penerima PKH disesuaikan dengan manfaat bagi masing-masing keluarga yang sudah

disesuaikan oleh pemerintah bahwa bantuan tersebut seharusnya cukup bagi penerima bantuan tersebut, hanya saja tergantung kepada penerimanya bagaimana mereka mengatur dan memanfaatkannya.

### **3.3 Kecukupan**

Dimensi kecukupan ini merupakan penilaian terhadap seberapa jauh hasil yang telah dicapai dari program ini dapat memecahkan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dimana indikatornya yaitu pemenuhan kebutuhan penerima bantuan serta seberapa besar kecukupan nominal bantuan PKH bagi kebutuhan penerimanya.

Berdasarkan observasi di lapangan banyak penerima bantuan ini yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merasa sangat puas dengan nominal yang telah diberikan, terlebih dengan beberapa fasilitas kesehatan yang mana hal ini sangat penting terkhusus bagi lanjut usia dan anak-anak yang paling rentan terkena penyakit. Akan tetapi, ada saja beberapa KPM yang merasa bahwa nominal bantuan tersebut dirasa kurang, hal ini menurut peneliti bahwa besarnya nominal yang diterima oleh mereka itu tidak sedikit dan tidak juga banyak, melainkan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menyambung hidup, itu semua tergantung dari bagaimana para penerima manfaat ini untuk memajemen penggunaan uang tersebut. Oleh karena itu, dari pihak pendamping PKH juga mengadakan beberapa program bagi mereka, salah satunya yaitu program pelatihan manajemen keuangan. Program manajemen keuangan ini tentunya sangatlah bermanfaat dikarenakan terkadang jika sudah memegang uang ada saja hal-hal yang tidak penting yang akan dibeli dan tentunya ini bukanlah maksud dan tujuan dari dibuatnya program keluarga harapan ini.

Dalam pelatihan manajemen keuangan ini, pendamping PKH mengajarkan bagaimana caranya untuk mengatur keuangan dalam satu keluarga yaitu dengan menyediakan beberapa amplop yang mana amplop tersebut kemudian ditulis berdasarkan jenis penggunaan yang paling pokok kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop sesuai dengan berapa banyak yang dibutuhkan, diajarkan juga untuk tetap menyisihkan sebagian uang untuk keperluan darurat atau emergency sebab terkadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan sudah sepatutnya untuk berjaga-jaga dengan menyisihkan beberapa uang dari bantuan tersebut.

### **3.4 Pemerataan**

Dimensi pemerataan ini merupakan dimensi untuk meninjau apakah pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial PKH telah merata diberikan kepada semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam menentukan berhak atau tidak berhaknya menerima bantuan PKH dari para calon peserta PKH ini bukanlah kebijakan kepala lingkungan atau ketua RT melainkan kebijakan dari penetapan oleh Menteri Sosial melalui beberapa tahap mekanisme pengajuan calon peserta KPM yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016. Mekanisme ini dimulai dengan tahap proses pengusulan data serta verifikasi dan validasi data kemudian tahap pengendalian/penjaminan kualitas, dan terakhir penetapan KPM. Kemudian nama-nama yang diusulkan oleh Kepala lingkungan kemudian disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dilakukannya proses verifikasi dan validasi data melalui aplikasi SIKS-NG oleh Dinas Sosial daerah yang kemudian diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilakukan penilaian oleh satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial. Dimana usulan-usulan tersebut akan dinilai apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria integritas data atau tidak, jika memenuhi maka akan diproses lebih lanjut namun jika tidak memenuhi kriteria integritas data maka akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk

kemudian diperbaiki lagi. Selain pengusulan oleh kepala lingkungan, calon peserta KPM juga bisa diusulkan secara individu melalui pendaftaran online. Untuk menentukan KPM yang berhak menerima bantuan ini dinilai berdasarkan beberapa indikator penilaian. Indikator-indikator masyarakat kurang mampu pada dasarnya terdiri dari keluarga yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya adalah relatif rendah berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2013.

Dari segi pemerataan nominal bantuan yang diterima menurut wawancara dengan penerima bantuan menyatakan bahwa nominal yang diterima sudah sesuai dengan yang terdapat di DTKS yang mana sudah diukur sesuai dengan jumlah tanggungan yang tercatat sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa bantuan yang diberikan sudah pas dan tidak kurang maupun kelebihan sehingga terjadinya pemerataan bagi seluruh penerima manfaat. Hal ini dibuktikan juga ketika peneliti melakukan observasi DTKS mengenai nominal yang diterima didapatkan hasil bahwa bantuan yang diberikan kepada KPM sesuai dengan yang tercatat di DTKS Dinas Sosial Kota Manado.

### **3.5 Responsivitas**

Dimensi Responsivitas ini merupakan penilaian apakah hasil kebijakan ini memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan penerima manfaat. Responsivitas ini bisa menjadi alat ukur untuk melihat tanggapan masyarakat terhadap PKH ini yang mana bisa saja berupa tanggapan positif ataupun tanggapan negatif. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa dimensi responsivitas pada pelaksanaan PKH di Kota Manado mendapatkan banyak respon positif baik dari pihak pelaksana maupun dari KPM. Dari hasil wawancara dan observasi langsung di rumah salah satu penerima manfaat banyak yang menyatakan bahwa KPM merasa sangat puas dimana bantuan tersebut sangat membantu bagi yang kurang mampu terlebih bagi yang memiliki anak berusia sekolah walaupun uang tersebut hanya sekedar digunakan untuk membeli perlengkapan saja.

Pada indikator responsivitas ini yang diukur adalah pengetahuan KPM tentang pelaksanaan PKH di Kota Manado yang sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan pendamping PKH di setiap kecamatan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Secara umum berdasarkan hasil observasi, banyaknya Keluarga Penerima Manfaat yang merasa sangat puas dengan program ini, sehingga bisa dilihat bahwa Program Keluarga Harapan ini mendapatkan banyak respon positif dari para penerima bantuan, terlebih banyak yang berharap bahwa program ini akan terus berlanjut, dikarenakan bantuan dari program ini mampu untuk menyambung banyaknya kehidupan masyarakat kurang mampu.

### **3.6 Ketepatan**

Dimensi ketepatan ini berupa apakah hasil yang dicapai tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima bantuan ini. Indikator yang ada pada dimensi ini yang pertama adalah tentang apakah kriteria PKH sudah tepat sasaran terhadap PMKS yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat, kemudian indikator yang kedua tentang apakah proses pelaksanaannya PKH ini sudah sesuai dengan harapan KPM.

Sasaran dari PKH ini sudah tepat sasaran dan dirasa sangat membantu. Berdasarkan wawancara dengan KPM bahwa dari segala aspek kehidupan KPM sangat diperhatikan terlebih dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bagi anak sekolah diberikan tunjangan khusus dikarenakan memiliki kebutuhan yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih baik dan dapat membantu membangun perekonomian negara sehingga jika angka kemiskinan berkurang, maka beban pengeluaran negara juga berkurang. Dari aspek kesehatan juga dijamin melalui bantuan ini, dimana penerima PKH diberikan fasilitas pemeriksaan

kesehatan gratis serta berobat tanpa biaya dengan menunjukkan kartu Jaminan Kesehatan yang sudah dibuatkan oleh pemerintah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan PKH ini sudah tercapai dan tepat sasaran sesuai dengan indikatornya

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Manado sejauh ini sudah berjalan dengan sangat baik, dimana KPM merasa puas dan bantuan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Kegiatan pendampingan yang diberikan juga sangat membantu dalam membuka cara berpikir mereka sehingga mereka terdorong untuk melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik. Sama halnya dengan temuan Taufiq Razali bahwa evaluasi pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik yang dinilai dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimana ini juga dinilai dari segi input, process, output, dan outcome dimana semuanya berjalan dengan baik, terlebih peran pendamping PKH yang sangat dibutuhkan. Sebenarnya tujuan dari program ini yaitu agar KPM dapat merubah cara berpikir mereka agar kiranya mereka dapat membuat sebuah usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka sehingga nantinya mereka dapat keluar dari kondisi terpuruk mereka. Untuk mengetahui seberapa besar kegiatan yang telah dikerjakan atau seberapa jauh peran telah dijalankan maka di perlukan suatu evaluasi untuk menjadikan patokan, perbedaan atau selisih dengan kegiatan sebelumnya, serta membandingkannya dengan ekspektasi yang ini di capai. Evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan. Evaluasi ini menghasilkan suatu kebijakan tertentu atas masalah yang dihadapi melalui usaha tertentu.

### **3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Manado yaitu kurangnya jumlah tenaga pendamping, dimana tenaga pendamping ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak sedangkan jumlah total tenaga pendamping hanya 38 orang di Kota Manado, sehingga diperlukan lebih banyak lagi tenaga pendamping agar kiranya proses pendataan juga dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu serta mengurangi kekeliruan dalam pendataan KPM.

## **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Manado sudah berjalan secara baik sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 jika di analisis dengan menggunakan teori Evaluasi oleh William Dunn (2000) yang dapat memenuhi 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang dibuktikan berdasarkan hasil dokumentasi, observasi di lapangan, serta wawancara dengan KPM yang sebagian besar menyatakan kepuasan dan kebutuhan yang terpenuhi.

Faktor penghambat berdasarkan observasi peneliti dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini yaitu kurangnya tenaga pendamping PKH di Kota Manado yang mana tidak sesuai dengan jumlah KPM yang didampingi, adanya data yang kurang sesuai dengan DTKS ketika pelaksanaan penyaluran bantuan, serta pola pikir peserta PKH yang tidak mau berjuang untuk kehidupan yang lebih baik lagi.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Manado dalam mengatasi kurangnya tenaga pendamping PKH berdasarkan hasil wawancara yaitu dengan mengajukan tambahan tenaga kepada pemerintah daerah. Kemudian untuk mengatasi tidak sesuainya data yang ada di DTKS dan ketika penyaluran bantuan, maka diberikannya tugas kepada pendamping PKH untuk selalu mendampingi sehingga jika terjadinya perubahan secara mendadak dapat segera diketahui dan dilaporkan. Selain itu, upaya sosialisasi kepada peserta PKH juga merupakan salah satu upaya awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Manado.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program keluarga harapan di Kota Manado untuk menemukan hasil yang lebih mendalam, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (2021). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota (Ribu Jiwa), 2019-2021*. <https://sulut.bps.go.id/indicator/23/38/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Dunn, William (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Febrian, W (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2019*. 67-87
- Hasanah, M (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Tahun 2020*. 40-55
- Riana Putri (2018). *Konsep Dasar Evaluasi, Penilaian, Pengukuran, dan Tes*. <https://id.linkedin.com/pulse/konsep-dasar-evaluasi-penilaian-pengukuran-dan-tes-riana-putri>
- Sosial, K. (2018). *Peraturan menteri sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*
- Taufiq, M., Dosen, R., Administrasi, I., Fakultas, N., Sosial, I., Humaniora, D., Dwi, M., & Mahasiswa, P. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018*. 58–134.